

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alif, Susiana, *et al.*, 2022, *Pendidikan Anti Korupsi (Menciptakan Pemahaman Gerakan dan Budaya Antikorupsi)*, Bandung: Widina Bakti Persada
- Angger Sigit dan Meylani Cahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Doni Muhandiansyah, 2010, *Buku Saku KPK : Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media
- M. Nurul Irfan, 2014, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual*, Jakarta : Amzah
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Glora Madani Press
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas Media Nusantara
- Siswanto Sunarso, 2012, *Victomologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty
- Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu

JURNAL

- Ahmad faisal, 2023, *Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*, *International Journal of Cross Knowledge : World Publishing Journal*, Volume 1

Nomor 2

- Andreas Quinn Hartono, Hermansyah, dan Hamdani, 2024, *Analisis Kewenangan Institusi Pemerintahan yang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan dan Kepolisian)*, Tanjungpura Journal of Law, Volume 1 Nomor 2
- Arrineki, Sofyan, dan Henny Yuningsih, 2024, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi di Indonesia*, *Lex Lata : Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 6 Nomor 1
- Chandra, et al., 2023, *Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Ius Civile : Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, Volume 7 Nomor 1
- Danu Surya Putra dan Rehnalamken Ginting, 2018, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Kabupaten Tapanuli Selatan*, *Recedive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 7 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, 2022, *Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System*, *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7 Nomor 2
- Erlita Kresna, 2021, *Aplikasi Penerapan Teori Fraud Triangle terhadap Kasus Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi*, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Volume 5 Nomor 1
- Erlita Kresna, 2022, *Pelayanan Seksual Sebagai Modus Baru Gratifikasi Pejabat Publik*, *Deviance Jurna Kriminologi*, Volume 6 Nomor 1
- Fajar Tri Sakti dan Sanri Nabila, 2018, *Pengaruh Pengawasan Pajak Hotel Terhadap Tingkat Kebijakan Wajib Pajak*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 8 Nomor 1
- H.A. Lawali Hasibuan dan Alvin Hamzah Nst, 2023, *Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki*, *Jurnal Legisla*, Volume 15 Nomor 2, Universitas Sunan Giri Surabaya
- Harris Kristanto dan Yani Osmawati, 2022, *Fenomena Gratifikasi Seksual di Indonesia Sebagai Bentuk Kejahatan Korupsi*, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Volume 6 Nomor 2
- Hendrawan, Deity, dan Firman, 2022, *Kebijakan Formulasi Gratifikasi Seksual Terhadap Penyelenggara Negara*, *Lakidende Law Riview*, Universitas Halu Oleo,

Hwian Christianto, 2020, *Batasan dan Perkembangan Penafsiran Ekstensif Dalam Hukum Pidanan*, Jurnal Pamator, Volume 3 Nomor 2

Muhammad Hendra, 2024, *Analisis Yuridis Unsur Dolus Dalam Delik Gratifikasi dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan No. 2205 K/Pid.Sus/2022)*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume 10 Nomor 21

Ramli, Astika, dan Arhjayati, 2024, *Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Pidana Islam*, *Journal of Islamic Criminal Law and Criminal Law*, Volume 1 Nomor 1

Regita, Iftar, dan Ratna, 2021, *Gratifikasi Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Semarang Law Riview*, Volume 2 Nomor 2, Universitas Semarang

Saeful Akbar, 2016, *Gratifikasi Seksual Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi : Sexual Gratification as a Form Of Corruption Criminal Offense*, Jurnal IUS : Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 3 Nomor 4

Saiful, Lubsi, dan Afrilia, 2022, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Ketentuan Pasal 111 Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Gratifikasi Sebagai Objek Pajak Negara)*, DiH: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 18 Nomor 1

Sulistiani, et al., 2023, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Lepas (onslag) terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, *Pampas: Journal od Criminal*, Volume 4 Nomor 1

Zulfa Aulia, 2018, *Hukum Positif dari Satjipto Raahardjo : Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, Jurnal Hukum : Undang, Volume 1 Nomor 1

WEBSITE

Dwiyani Permatasari, *Gratifikasi Akar dari Korupsi : Kenali, Hindari, Waspadai!*, Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Desember 2021.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-artikel/14565/Gratifikasi-Akar-dari-Korupsi-Kenali-Hindari-Waspadai.html>

Muhammad Nursam, *Alasan Bukan Pejabat Negara, KPK Putuskan Kasus Jet Pribadi Kaesang Bukan Gratifikasi*, <https://fajar.co.id/2024/11/01/alasan-bukan-pejabat-negara-kpk-putuskan-kasus-jet-pribadi-kaesang-bukan-gratifikasi/> diakses pada tanggal 2 November 2024, pukul 18.45

Yandi Rofiyandi, Hakim Setyabudi Menerima Gratifikasi Seks, <https://nasional.tempo.co/read/473942/hakim-setyabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seks> diakses pada tanggal 2 November 2024, pada pukul 18.30

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Dokumen Lainnya

Bahrani, Dadin, dan Nasrullah, 2022, *Tinjauan Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Seks*, Artikel, ePrints Uniska

Fathur Rahman, Zulfan, dan Iqbal, 2024, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Korupsi: Polisi, Jaksa dan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019*, Artikel, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Isnanta Ahmad dan Aroma Elmina Martha, 2021, *Penerapan Pasal 12 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Orang Yang Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara (Putusan Pengadilan Nomor : 45/PID.Sus-TPK/2017/PN.Bgl)*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Wawancara

Wawancara dengan bapak Dion Valerion selaku staff Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 23 Mei 2025 melalui Microsoft Teams

Wawancara dengan Bapak Dr. Loade M. Syarif, S.H., LL.M Selaku Dosen Fakultas Hukum Unhas dan Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2015-2019 pada tanggal 29 April 2025 melalui Zoom Meeting

Wawancara dengan Bapak Ferdhy selaku staff biro hukum komisi pemberantasan korupsi pada tanggal 23 Mei 2025 melalui Microsoft Teams

Wawancara langsung dengan Bapak Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Januari 2025 di Pengadilan Negeri Makassar

Wawancara dengan Bapak Wisnu Perdana selaku Kepala Sub Seksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta selatan pada tanggal 18 Mei 2025 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Wawancara dengan Bapak Wizar selaku Kepala Unit Subdit Kriminal Khusus Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2025 di Polres Metro Jakarta Selatan

Wawancara dengan Ibu Indira Malik selaku Staff Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 23 Mei 2025 melalui Microsoft Teams

Wawancara dengan ibu Andi Satriani A.S. selaku Penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Februari 2025 di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan